

## MODEL PEMBERDAYAAN UMKM PADA DAERAH LAHAN BASAH PASCA BENCANA BANJIR DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

**Setio Utomo, Noor Hidayati, Hairudinor**

Afiliasi/Institusi, Alamat, kota, Negara

<sup>2</sup>Afiliasi/Institusi, Alamat, kota, Negara

<sup>3</sup>Afiliasi/Institusi, Alamat, kota, Negara

(penulis bisa lebih dari tiga; apabila institusi sama, tulis dengan nomor sama)

\*Penulis korespondensi: first.author@institution.org (email penanggung jawab tulisan)

**Abstrack** . Tujuan kegiatan penelitian ini adalah terciptanya model pemberdayaan UMKM pada daerah lahan basah pasca bencana banjir. Model yang akan dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan ketahanan UMKM pasca bencana di kabupaten Hulu Sungai tengah. Tujuan khusus penelitian ini yaitu a) Mengidentifikasi karakteristik pemberdayaan UMKM pada daerah lahan basah pasca bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, b)Menganalisis pola pemberdayaan UMKM pada daerah lahan basah pasca bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, c) Menyusun model pemberdayaan UMKM pada daerah lahan basah pasca bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Metode Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei pada UMKM yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggunakan instrument penelitian dan didukung wawancara mendalam untuk memetakan permasalahan dan kebijakan yang akan diambil dalam memberdayakan UMKM terdampak bencana. Selanjutnya menggunakan studi kepustakaan untuk mensinkronisasikan keadaan lapangan dengan seluruh program-program pemerintah daerah dan stake holder terkait untuk dirangkai menjadi sebuah model pemberdayaan UMKM pada kawasan lahan basah pasca bencana di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Metode AHP menggunakan Software Rappfish untuk merumuskan formulasi model keputusan secara terstruktur dengan pemodelan AHP untuk penetapan prioritas pemberdayaan UMKM pada daerah lahan basah pasca bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Target Luaran yaitu 1) Model Pemberdayaan UMKM pada Daerah Lahan Basah Pasca Bencana Banjir. 2) Artikel ilmiah (Prosiding) Model Pemberdayaan UMKM pada Daerah Lahan Basah Pasca Bencana Banjir. Hasil pengolahan data penelitian dengan menggunakan *Expert Choice* 11 dari responden ahli/pakar (Pemerintah Daerah, UMKM, Perguruan Tinggi, dan Perusahaan), didapatkan hasil kriteria fasilitas pemasaran (20%) dan prioritas/alternatif ketahanan usaha UMKM (38%) sebagai strategi dalam program pemberdayaan dan meningkatkan ketahanan UMKM pada daerah lahan basah pasca bencana banjir di kabupaten Hulu Sungai Tengah.

**Kata kunci:** Pemberdayaan, UMKM, Pasca Bencana banjir

### 1. PENDAHULUAN

Resiko bencana alam merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari oleh manusia, kerugian yang ditimbulkan dari bencana alam seperti gempa bumi, angin topan dan banjir, dimana kejadiannya tidak terjadi secara periodik tetapi sulit untuk diprediksi. (Lee, 2007). Bencana yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Definisi bencana menurut UU No. 24 tahun 2007). Mitigasi adalah setiap kegiatan yang mengurangi baik kemungkinan bahaya yang terjadi atau bahaya yang berubah menjadi bencana, Pengurangan risiko langkah-langkah antisipatif dan tindakan yang berusaha untuk menghindari risiko di masa depan sebagai hasil bencana, Pencegahan, menghindari bencana, Kesiapsiagaan, rencana atau persiapan yang dibuat untuk menyelamatkan nyawa atau harta, dan membantu respon dan penyelamatan operasi layanan. Mitigasi bencana dibutuhkan alam menghadapi adanya bencana alam. Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 mitigasi adalah upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana.

Penanggulangan bencana dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu pra-bencana dan pasca-bencana. Preferensi masyarakat dalam sebelum kejadian bencana (pra-bencana) atau yang biasa

dikenal dengan mitigasi bencana. Mitigasi didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan (Kusumasari, 2014). Tujuan mitigasi bencana alam adalah pengurangan kemungkinan resiko, pengurangan konsekuensi resiko, menghindari resiko, penerimaan resiko, serta transfer, pembagian, atau penyebarluasan resiko (Kusumasari, 2014).

Akhir-akhir ini di Indonesia menunjukkan gejala semakin meningkatnya gejala bencana hidrometeorologi yaitu bencana yang diakibatkan oleh kondisi meteorologi dan kondisi hidrologi seperti banjir, dan hujan dengan intensitas tinggi. Secara umum banjir adalah suatu kejadian dimana air didalam saluran meningkat dan melampaui kapasitas daya tampungnya. Setiap jenis banjir tersebut memiliki karakteristik yang khas. Banjir bandang adalah kejadian banjir yang singkat disebabkan oleh hujan lebat, bendungan jebol, tanggul jebol. Banjir bandang ini dikarakterisasikan dengan cepatnya kenaikan muka air sungai. Dalam proses kejadian banjir bandang, longsor adalah yang pertama terjadi yang dipicu oleh terjadinya hujan, selanjutnya banjir bandang merupakan kejadian berikutnya sebagai kelanjutan dari kejadian longsor (Larsen, 2001).

Banjir yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan mencakup sebagian besar wilayah dan memaksa sebagian warga mengungsi. Jalan-jalan di area perkotaan dan perdesaan di Hulu Sungai Tengah tergenang. Banjir juga menggenangi kawasan pusat perbelanjaan, membuat pasar-pasar, pertokoan, Perkantoran, bank, dan sekolah serta UMKM semuanya ditutup akibat banjir. Warga yang rumahnya kebanjiran sebagian mengungsi ke masjid atau tempat yang lebih aman.

Ketahanan usaha UMKM pasca bencana banjir memerlukan pemberdayaan UMKM yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat serta strategi seperti peningkatan kemampuan finansial, pengembangan pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia dan menjadikan UMKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri, (Santosa, 2017). Memberdayakan UMKM dengan menciptakan akses ke keuangan dan pelatihan dan pemasaran dengan melibatkan masyarakat miskin dan menengah akan meningkatnya kontribusi pada pendapatan rumah tangga dan pembangunan lingkungan. Kurangnya modal, kurangnya tempat kerja yang tepat, kurangnya tenaga kerja terampil yang sesuai dan pemasaran tanpa pemanfaatan teknologi adalah masalah utama pemberdayaan masyarakat miskin dalam memulai usaha, (Terefe, 2018).

Hasil penelitian Kurniawan (2014) menyatakan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas pemberian modal usaha dan kurang maksimalnya bantuan pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena dalam pemberdayaan UMKM ini terdapat faktor pendukung yaitu sumber daya manusia yang melimpah atau tenaga kerja yang memadai, bahan baku yang mudah ditemukan dan murah, modal usaha yang ringan, Sedangkan, faktor penghambat dalam pemberdayaan yaitu kurang maksimalnya bantuan dari pemerintah, tidak adanya tempat pembuangan limbah, dan tidak adanya sentar pemasaran hasil produksi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Secara kuantitas, UMKM di Kalimantan Selatan memiliki pangsa 5,13% dari total UMKM di Indonesia. Dari sisi tenaga kerja, UMKM mampu menyerap tenaga kerja hingga 98,49% atau sebesar 3,13 juta orang dari total tenaga kerja di Kalimantan. Dari sebaran UMKM tersebut, Kalimantan Selatan memiliki pangsa tertinggi yaitu 34,52% dari total UMKM di Kalimantan atau sebesar 462,57 ribu, dengan serapan tenaga kerja mencapai 83,39% dari total tenaga kerja di Kalimantan Selatan. Meski secara kuantitas UMKM di Kalimantan memiliki pangsa terendah dibandingkan dengan wilayah lain, sebagian besar UMKM di Kalimantan berada pada level sukses dan potensial yang siap memperluas pasar secara online dan mendapatkan akses pembiayaan. Jumlah IKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 3.334. Jumlah IKM dimasing-masing kecamatan yakni Kecamatan Limpasu 269, Batang Alai Utara 336, Batang Alai Timur 148, Pandawan 758, Hantakan 154, Batang Alai Selatan 445, Haruyan 384, dan Barabai 830, (**Disperindag Hulu Sungai Tengah, 2020**). Saat ini, UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagian besar terdampak bencana banjir dan untuk mempertahankan usaha serta besarnya kemungkinan bencana serupa pada

tahun-tahun mendatang, maka pelaku UMKM perlu mendapatkan dorongan dari aspek mitigasi bencana dan pemberdayaan.

Tujuan kegiatan penelitian ini adalah terciptanya model pemberdayaan UMKM pada daerah lahan basah pasca bencana banjir. Model yang akan dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan ketahanan UMKM pasca bencana di kabupaten Hulu Sungai tengah. Tujuan khusus penelitian ini yaitu a) Mengidentifikasi karakteristik pemberdayaan UMKM pada daerah lahan basah pasca bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, b) Menganalisis pola pemberdayaan UMKM pada daerah lahan basah pasca bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, c) Menyusun model pemberdayaan UMKM pada daerah lahan basah pasca bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## 2. PEMBERDAYAAN UMKM

Pemberdayaan merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya sehingga rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis, (Harahap E. F., 2012). Upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek : *Pertama, ENABLING* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. *Kedua, EMPOWERING* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. *Ketiga, PROTECTING* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada.

Hasil penelitian (Masrukin, et al, 2016) menunjukkan bahwa keterkaitan antara pemberdayaan dan pembiayaan ekonomi dapat mengembangkan bisnis masyarakat yang belum berkembang dan sebagai perusahaan induk untuk memenuhi kebutuhan permodalan, bahan baku, dan akses jaringan pemasaran serta mempromosikan semua jenis bisnis masyarakat sehingga dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan lembaga ekonomi sebagai penguatan ekonomi lokal. Peningkatan kapasitas kelembagaan menunjukkan usaha untuk meningkatkan peran dan mengembangkan tata kelembagaan di tingkat masyarakat yang mampu mewadahi setiap gagasan, usulan dan aspirasi dari masyarakat untuk kemajuan dalam komunitasnya. Beragam strategi untuk memberdayakan UMKM termasuk mengintensifkan partisipasi UMKM, menghubungkan UMKM dengan pendidikan, memasarkan sumber daya lokal, dan memasukkan UMKM ke dalam politik yang lebih luas. Pemasaran sumber daya lokal dapat mendorong pemberdayaan ekonomi yang lebih tinggi di bidang konservasi, sedangkan penyebaran informasi dengan dukungan program pendidikan terpadu yang memanfaatkan kondisi lokal untuk meningkatkan UMKM, (Constantino, et, al, 2012).

### A. PENGANGGULANGAN BENCANA

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang diikuti beberapa regulasi yang terkait, yaitu Peraturan Presiden Nomor. 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Bencana merupakan suatu fenomena alam yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Fenomena tersebut dapat terjadi setiap saat, secara tiba-tiba atau melalui proses yang berlangsung secara perlahan. Dalam menghadapi adanya bencana alam maka dibutuhkan adanya mitigasi

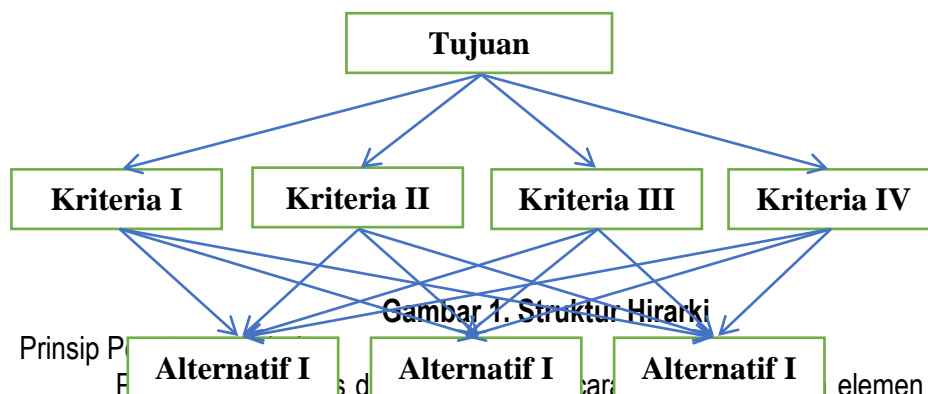
bencana alam. Menurut UU No 24 Tahun 2007, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 9 dan PP No 21 Tahun 2008, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6, arti mitigasi adalah upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

## B. METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)

Proses pengambilan keputusan merupakan sistem tindakan karena ada beberapa komponen yang menurut (Prajudi, 2004) kerangka kerja sistem pengambilan keputusan yaitu 1) Posisi pengambil keputusan, 2) Permasalahan, 3) Situasi, 4) Kondisi, 5 Tujuan. *Analytical Hierarchy Process* (AHP) sebagai metode pengambilan keputusan, untuk sistem pendukung keputusan yang dibangun. Metode AHP merupakan salah satu metode dalam proses pengambilan keputusan, yang dibangun berdasarkan tiga prinsip, yaitu prinsip penyusunan hirarki, prinsip penetapan prioritas, dan prinsip konsistensi. Berikut tahapan metode AHP:

### 1. Prinsip Penyusunan Hirarki

Tingkat teratas pada hirarki adalah fokus atau tujuan. Sedangkan tingkat dibawahnya adalah kriteria. Apabila masih bisa dipecah maka tingkat selanjutnya dinamakan sub kriteria, dan seterusnya sampai tingkatan akhir yang merupakan alternatif-alternatif yang akan dipilih. Berikut adalah bentuk struktur hirarki:



### 2. Prinsip Perbandingan Berpasangan

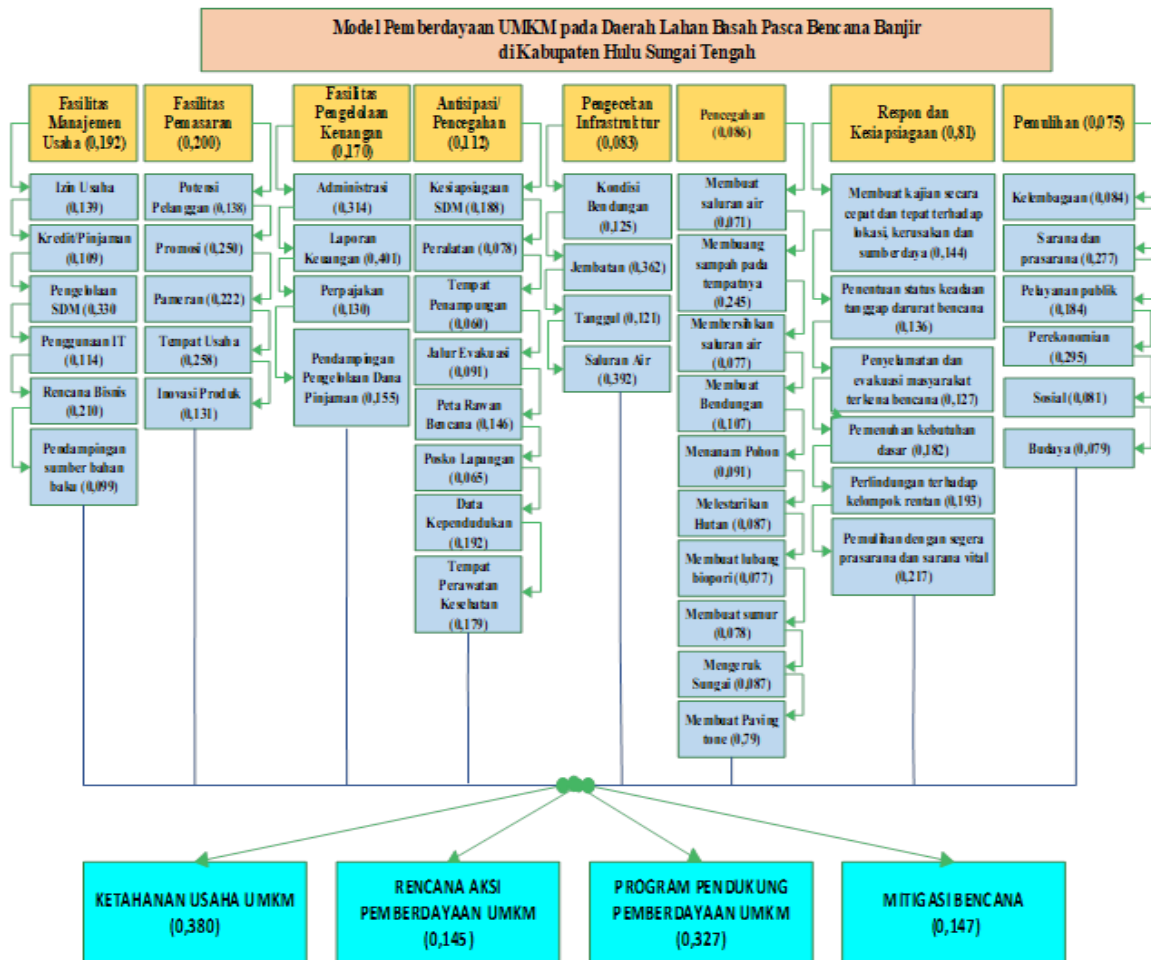
Prinsip perbandingan berpasangan adalah membandingkan elemen yang satu dengan elemen yang lain kedalam bentuk matriks. Cara ini dapat disebut perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Pada perhitungan ini, digunakan skala perbandingan 1 sampai 9. Skala perbandingan ini disebut sebagai skala fundamental, yang diturunkan berdasarkan kemampuan individu dalam membuat suatu perbandingan secara berpasangan terhadap elemen-elemen yang akan dibandingkan. Berikut adalah tabel skala perbandingan AHP:

Tabel 1. Skala Perbandingan AHP

Tingkat	Definisi	Keterangan
1	Sama pentingnya	Kedua elemen memiliki pengaruh yang sama
3	Agak lebih penting yang satu atas yang lainnya	Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
5	Cukup penting	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan atas satu aktifitas lebih dari yang lain
7	Sangat penting	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan yang kuat atas satu aktifitas lebih dari yang lain
9	Mutlak lebih penting	Satu elemen mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan tertinggi
2,4,6,8	Nilai tengah diantara dua nilai yang berdekatan	Bila kompromi dibutuhkan

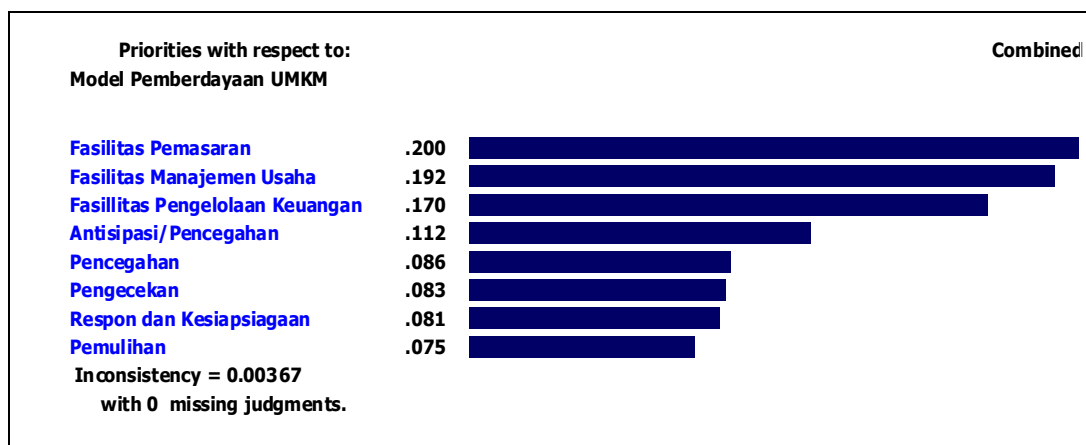
### C. MODEL PEMBERDAYAAN UMKM PADA DAERAH LAHAN BASAH PASCA BENCANA BANJIR DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Hasil pengolahan data menggunakan *Expert Choice* 11 dari responden ahli (UMKM, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Perusahaan), Gambar berikut ini hasil persentase kriteria dan alternatif Model Pemberdayaan UMKM pada Daerah Lahan Basah Pasca Bencana Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan perangkat lunak *Expert Choice* 11 :



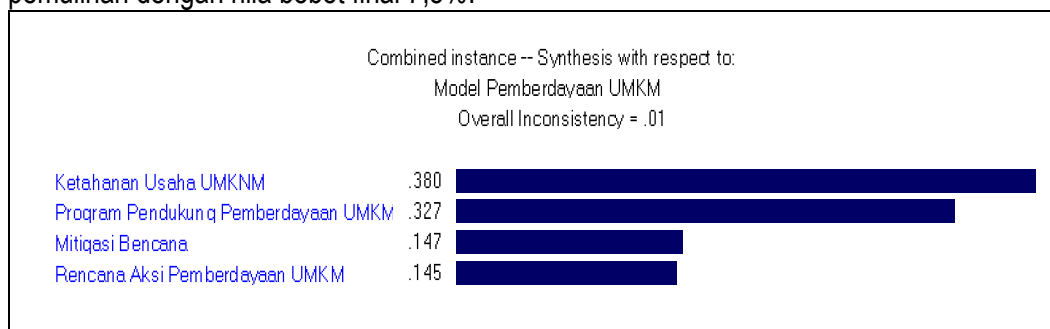
### D. HASIL FINAL AHP MODEL PEMBERDAYAAN UMKM PADA DAERAH LAHAN BASAH PASCA BENCANA BANJIR DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Berdasarkan pengolahan data Model Pemberdayaan UMKM pada Daerah Lahan Basah Pasca Bencana Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggunakan *Expert Choice* 11, maka dapat ditunjukkan komposisi hasil *combined* dengan mode ideal dari responden ahli (UMKM, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Perusahaan) untuk alternatif yang terpilih.



**Gambar Priorites Derived From Fairwise Comparisons Goal Respect To: Model Pemberdayaan UMKM**

Hasil pengolahan data AHP dengan menggunakan *Expert Choice 11* menunjukkan bahwa aspek/kriteria fasilitas pemasaran dengan nilai bobot final yang lebih tinggi, dan dominan dibandingkan aspek/kriteria lainnya oleh pakar/ahli, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek/kriteria fasilitas pemasaran dapat dipertimbangkan sebagai salah satu strategi dalam pemberdayaan UMKM pada daerah lahan basah pasca bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya aspek/kriteria fasilitas manajemen usaha dengan nilai bobot final 19,2%, fasilitas pengelolaan keuangan dengan nilai bobot final 17%, pecegahan dengan nilai bobot final 8,6% , pengecekan dengan nilai bobot final 8,3%, respon dan kesiapsiagaan dengan nilai bobot final 8,1%, dan pemulihan dengan nila bobot final 7,5%.



**Gambar. Synthesis With Respect To Goal**

Hasil pengolahan data AHP dengan menggunakan *Expert Choice 11* menunjukkan bahwa prioritas/alternative ketahanan usaha UMKM dengan nilai bobot final yang lebih tinggi, dan dominan dibandingkan prioritas/alternatif lainnya oleh pakar/ahli, sehingga dapat disimpulkan bahwa prioritas/alternatif ketahanan usaha UMKM dapat dipertimbangkan sebagai salah satu strategi dalam pemberdayaan UMKM pada daerah lahan basah pasca bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya prioritas/alternatif program pendukung pemberdayaan UMKM dengan nilai bobot final 32,7%, mitigasi bencana dengan nilai bobot final 14,7%, dan rencana aksi pemberdayaan UMKM dengan nilai bobot final 14,5%.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah penetapan prioritas pemberdayaan UMKM pada daerah lahan basah pasca bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diuji menggunakan metode *Analytical Hierarki Process (AHP)* dengan menggunakan perangkat lunak *Expert Choice 11* dan nilai konsistensi yang dipertahankan 10% dari masing-masing pendapat ahli. Hasil pengolahan data pemberdayaan UMKM pada daerah lahan basah pasca bencana banjir menunjukkan bahwa; 1) Nilai aspek/kriteria fasilitas pemasaran lebih tinggi dibandingkan aspek/kriteria lainnya dan 2) Alternatif/prioritas ketahanan usaha UMKM lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif lainnya.

**Tabel 2. Nilai Bobot Final Aspek/Kriteria dan Altenatif/Prioritas AHP Model Pemberdayaan UMKM Daerah Lahan Basah Pasca Bencana Banjir**

Aspek/Kriteria	Bobot	Alternatif/Prioritas	Bobot
Failitas Manajemen Usaha	19,2%	Ketahanan Usaha UMKM	38%
Fasilitas Pemasaran	20%		
Fasilitas Pengelolaan Keuangan	17%	Rencana Aksi Pemberdayaan UMKM	14,5%
Antisipasi/Pencegahan	11,2%		
Pengecekan	8,3%	Program Pendukung Pemberdayaan UMKM	32,7%
Pencegahan	8,6%		
Respon dan Kesiapsiagaan	8,1%	Mitigasi Bencana	14,7%
Pemulihan	7,5%		

Sumber : Analisis Expert Choice 11, 2021.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan Expert choice 11, didapatkan hasil kriteria fasilitas pemasaran sebagai salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan dalam pemberdayaan UMKM pada daerah lahan basah pasca bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan nilai 20%. Selanjutnya aspek/kriteria fasilitas manajemen usaha dengan nilai bobot final 19,2%, fasilitas pengelolaan keuangan dengan nilai bobot final 17%, pecegahan dengan nilai bobot final 8,6% , pengecekan dengan nilai bobot final 8,3%, respon dan kesiapsiagaan dengan nilai bobot final 8,1%, dan pemulihan dengan nila bobot final 7,5%.
2. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan Expert choice 11, didapatkan hasil prioritas/altenatif ketahanan usaha UMKM sebagai salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan dalam pemberdayaan UMKM pada daerah lahan basah pasca bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan nilai 38%. Selanjutnya prioritas/alternatif program pendukung pemberdayaan UMKM dengan nilai bobot final 32,7%, mitigasi bencana dengan nilai bobot final 14,7%, dan rencana aksi pemberdayaan UMKM dengan nilai bobot final 14,5%

### SARAN

1. Pemerintah Daerah agar lebih memprioritaskan fasilitas pemasaran dan ketahanan usaha UMKM sebagai strategi dalam program pemberdayaan dan meningkatkan ketahanan UMKM pada daerah lahan basah pasca bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pelaku usaha agar lebih memperhatikan fasilitas pemasaran dan ketahanan usaha UMKM sebagai strategi ketahanan usaha pada daerah lahan basah pasca bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Perusahaan agar lebih meningkatkan program CSR dalam memberdayakan pelaku UMKM pada daerah lahan basah pasca bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bevaola Kusumasari, 2014, Manajemen bencana dan kapabilitas Pemerintah Lokal, Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Harahap, E. F. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 78-96.
- Kurniawan, F., & Fauziah, L. (2014). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2(2), 165-176.
- Larsen, M. C. (2001). *Landslide Hazards Associated with Flash-Floods, with Examples from the Dexember*, 1999.
- Masrukin, A. S. (2016). Community Empowerment Model through Cooperative for the Villages Most Severely Affected By Eruption of Merapi. *International Journal of Social Science and Humanity*, 57-60.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Santosa, A. M. (2017). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UKM Kota Bekasi. *Parameter* Volume 2 No.1, 47-53.
- Terefe, S. M. (2018). Penilaian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Skala Mikro dan Kecil di Ethiopia: (Kasus Kota Debre Markoss). *International Journal of Research in Management, Economics and Commerce*, 158-163.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.



- Constantino et al. 2012. "Empowering Local People Through Community-based Resource Monitoring: A Comparison between Brazil and Namibia" dalam *Ecology and Society*, 17(4).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.
- Prajudi. (2004). Proses Pengambilan Keputusan. In A. Syafaruddin, *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan* (p. 47). Jakarta: Grasindo.